

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
MENIKAHI WANITA YANG SALAH SATU DARI KEDUA
ORANG TUANYA SUDAH MENINGGAL DUNIA
(Studi Pada Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji,
Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Nur Sani Azizatun Nikmah

NPM: 1621010135

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
MENIKAHI WANITA YANG SALAH SATU DARI KEDUA
ORANG TUANYA SUDAH MENINGGAL DUNIA
(Studi Pada Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji,
Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Nur Sani Azizatun Nikmah

NPM: 1621010135

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Pembimbing I : Drs. H. Zikri M,Sos

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawati S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia (Studi Pada Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Abstrak

Oleh. Nur Sani Azizatun Nikmah

Larangan menikah yang menjadi kebiasaan atau tradisi, salah satunya adalah larangan menikah wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Larangan ini tidak terdapat dalam kajian hukum Islam, tetapi merupakan kepercayaan turun temurun yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, termasuk di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana praktik larangan menikah wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan persepektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik larangan menikah wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik larangan menikah wanita tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisa data dengan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah, praktik larangan menikah wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia di Desa Sumber Deras merupakan aturan turun temurun yang dipercaya sebagai warisan nenek moyang, yang tidak boleh dilanggar dan harus dilestarikan. Masyarakat percaya, jika aturan tersebut dilanggar, akan membuat Batara Kala marah dan mendatangkan bencana. Larangan menikah wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dari segi hukum Islam dipandang sebagai urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena percaya pada kekuatan lain selain Allah, yaitu Batara Kala, berarti aturan ini termasuk dalam perbuatan syirik.

Kata Kunci : Tinjauan, Hukum Islam, Larangan, Menikah, Wanita, Orang Tua, Meninggal Dunia



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131, Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI LARANGAN MENIKAHI WANITA
YANG SALAH SATU DARI KEDUA ORANG
TUANYA SUDAH MENINGGAL DUNIA (Studi
Pada Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji,
Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

Nama

: Nur Sani Azizatun Nikmah

NPM

: 1621010135

Jurusan

: Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas

: Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosakan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosa Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Bandar Lampung,

2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Zikri M.Sos

NIP.196808271994031004

Dr. Hj. Linda Firdawati S.Ag., M.H.

NIP.197112041997032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah

Rohmat S.Ag., M. HI

NIP.197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAHI WANITA YANG SALAH SATU DARI KEDUA ORANG TUANYA SUDAH MENINGGAL DUNIA (Studi Pada Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir)."**
Disusun oleh: **Nur Sani Azizatun Nikmah, NPM: 1621010135**, Program Studi: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Rabu/ 13 Januari 2021**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad. M.H.

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji I : Drs. H. Zikri M.Sos

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawati S.Ag., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Di samping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia (Studi Pada Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir)”**.

Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini adalah:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya

¹Ratminto dan Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005),h.2.

ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.²

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.³ Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah.

3. Tradisi adalah pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, serta kebiasaan-kebiasaan. Tradisi bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, melainkan dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Karena manusia yang membuat tradisi, maka manusia itu juga yang dapat menerimanya, menolaknya maupun mengubahnya.⁴

² Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10

³ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017, h. 322

⁴ Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)*, *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 2, 1 (September 2017): 75-83

4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.⁵
5. Menurut Abu Zahrah, definisi nikah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara'*.⁶
6. Dijelaskan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, "Orang tua adalah ayah ibu kandung".⁷

Berdasarkan beberapa penegasan arti di atas, maka yang dimaksud dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia", adalah penelitian tentang warisan kepercayaan turun-temurun mengenai aturan tidak diperbolehkannya seorang laki-laki melakukan akad atau pernikahan kepada wanita yang salah satu dari ibu atau bapaknya sudah meninggal dunia, dimana penelitian dilakukan penulis di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia (Studi Pada Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir)" adalah sebagai berikut:

⁵ <https://kbbi.web.id/larang> diakses tanggal 24 Juli 2020 pukul 01.15

⁶ Asbar Tantu, *Arti Pentingnya Pernikahan*, Jurnal Al-Hikmah Vol. XIV No. 2/2013, h. 257

⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h.629

1. Alasan Obyektif

Penelitian ini cukup menarik untuk diteliti, karena yang melakukan penelitian tradisi larangan pernikahan masih cukup jarang. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat latar belakang bahwa larangan pernikahan ini seperti menjadi ancaman bagi pasangan yang mana dari pihak perempuan yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Mereka seolah menjadi korban adat-adat para orang tua yang terdahulu.

2. Alasan subyektif

Judul ini cukup menarik untuk diteliti bagi penulis. Di samping itu, judul ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan hukum Islam, yang diperkuat referensi, surat kabar, maupun media elektronik lainnya.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam pengertian masyarakat adat adalah menyatukan dua manusia, laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, untuk membentuk suatu keluarga dan memperoleh keturunan. Masyarakat adat menganggap dalam perkawinan harus ditimbang bibit, bebet, dan bobot. Laki-laki yang akan menikahi wanita, harus melihat faktor-faktor tertentu yang dimiliki oleh wanita yang akan dinikahnya, baik dari segi pendidikan, kemampuan, maupun latar belakang orang tuanya. Dalam suatu perkawinan, memilihkan jodoh untuk anak, bukanlah kewajiban dari orang tua, meskipun anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah

yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.⁸

Dalam masyarakat adat di wilayah tertentu, banyak yang masih menggunakan tradisi atau kepercayaan turun temurun dari nenek moyang, yang kemudian dilestarikan dan berkembang hingga saat ini, termasuk mengenai larangan untuk menikahi wanita yang salah satu dari orang tuanya sudah meninggal dunia. Tradisi ini telah berlaku sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam tradisi tersebut, menikahi wanita yang salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia, dianggap “pamali” atau tidak baik bagi kelangsungan rumah tangga. Padahal, jika ditelaah lebih lanjut, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁸ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal ASAS, Volume 6 Nomor 2, 2014

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Roudlotul Jannah, 2009), h. 406

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia (telah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah telah menciptakan setiap manusia berpasang-pasangan, dan telah ditetapkan untuk manusia jodoh masing-masing, dengan menciptakan rasa kasih sayang diantaranya. Dengan demikian, dalam Ayat tersebut, Allah menganjurkan setiap pasangan untuk menikah, supaya menciptakan ketentraman diantara keduanya.

Pernikahan diciptakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sebagai sebuah ikatan yang biologis yang sah, dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang sudah digariskan oleh Islam.

Selain adanya anjuran untuk melakukan pernikahan terdapat pula unsur-unsur yang melarang pernikahan dalam artian haram dilakukan atau tidak sah hukumnya. Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara pria dan wanita, yaitu aturan mengenai perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang wanita. Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat permanen dan keharaman yang bersifat sementara. Larangan yang bersifat permanen dalam artian haram untuk selamanya terbagi menjadi tiga kelompok yaitu :¹⁰

- a. Disebabkan adanya hubungan kekerabatan atau nasab.
- b. Disebabkan adanya hubungan perkawinan.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
h. 62

- c. Disebabkan adanya hubungan susuan atau *rodlo'ah*.

Sedangkan larangan perkawinan yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu bisa berubah dibagi dalam beberapa macam yaitu:¹¹

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara.
- b. Wanita yang sedang iddah.
- c. Wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain.
- d. Wanita yang sudah ditalak tiga.
- e. Mengawini lebih dari empat orang wanita.
- f. Larangan karena sedang ihram.
- g. Larangan beda agama.
- h. Larangan karena perzina'an.

Selain itu, terdapat pula *urf* atau kebiasaan dalam dunia, yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* dibagi menjadi 2 macam yaitu :¹²

- a. *Urf shohih* ialah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*
- b. *Urf fasid* ialah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan bertentangan dengan *syara'*

Larangan menikah yang menjadi kebiasaan atau tradisi, salah satunya adalah larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Larangan

¹¹ *Ibid.*

¹² Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al maarif 1986), h.42

ini tidak terdapat dalam kajian hukum Islam, tetapi merupakan kepercayaan turun temurun yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, termasuk di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Larangan ini hanya bersumber dari informasi yang diturunkan oleh masyarakat dari generasi ke generasi, tanpa adanya sumber atau panduan yang jelas mengenai keabsahannya. Larangan ini tentunya menjadi masalah, karena merugikan salah satu pihak, terutama wanita yang salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan pada bulan Juni 2020, salah satu wanita yang sudah memasuki usia menikah dan sudah mempunyai pasangan, terpaksa harus memutuskan hubungan dengan calon suaminya dikarenakan salah satu dari orang tua wanita tersebut sudah meninggal dunia. Hal ini tentu saja membuat wanita tersebut merasa terpuruk, dan pada akhirnya memilih untuk meninggalkan desa, serta merantau ke luar kota.

Pesan-pesan moral agama Islam sangat dibutuhkan demi menjawab permasalahan yang kerap hadir di setiap zaman. Apalagi, bila nash Al-Qur'an berhadapan langsung dengan globalisasi dan modernisasi, kadang terbesit dalam pikiran, bagaimana jika sebuah hukum agama sudah ada dalam sumber tertulis Al-Qur'an dan Hadist (*qath'iyah al-subut*), sementara keadaan membutuhkan penafsiran baru. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan

kaidah hukum, bahwa keadaan tertentu dapat memaksakan sebuah larangan untuk dilaksanakan (*al-dharuratu tubihul mahdzurat*).¹³

Dari uraian tersebut, penulis tertarik menganalisis sebab pelarangan perkawinan karena salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Deras, sehingga bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia (Studi Pada Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir)”**.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

¹³ Abdul Qodir Zaelani, *Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.1, Januari 2014

1. Bagaimana praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

G. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Dilihat dari kajian keilmuan, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian empiris, adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat secara langsung kenyataan yang ada.¹⁴ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotes-hipotes agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁵

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.18

¹⁵ *Ibid.*

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif, bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui variabel independen dan dependennya.¹⁶ Dalam hal ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap akibat praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.

2. Desain Penelitian

a. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer.

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian, yaitu kepada beberapa dewan adat, serta masyarakat di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :¹⁷

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kajian Hukum Islam dan Undang-Undang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.¹⁸

3. Metode Data

Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa

¹⁸ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung;Mandar maju,2000), h.73

kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹

4. Populasi, Sampel, dan Lokasi Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif memilih lokasi atau partisipan tertentu dengan tujuan agar mereka membantu peneliti memahami masalah dan pertanyaan penelitian :

a. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.²⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2) Sampel

Sampel adalah bagian suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi.²¹ Sampel dalam penelitian ini adalah dewan adat, masyarakat Desa Sumber Deras yang memasuki usia pernikahan,

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.18

²⁰ *Ibid*, h. 80

²¹ Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), h. 336

serta masyarakat Desa Sumber Deras yang sudah menikah, berjumlah 10 orang.

b. Setting (lokasi riset)

Lokasi tempat peneliti ialah Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Jenis Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari asas kajian hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan, dan tradisi yang berlaku di masyarakat mengenai aturan dan larangan pernikahan. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

2) Studi Lapangan

Lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi.

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan.²² Peneliti juga akan melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan melalui wawancara terstruktur dengan pihak terkait dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b) Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.²³ Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

6. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (editing)

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penyusunan/Sistematika Data (constructing/systematizing)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

7. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode induktif. Metode induktif ini digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara verbal. Teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain

metode induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁴



²⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, (Malang: UIN Maliki, 2010), Cet. Ke -2, h. 130

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Taddakhul, Al-Jam'u, atau Al-Aqdu yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad.²⁵

Secara Terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Menurut Dr. Ahmad Ghandur seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Syarifuddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak timbal balik hak-hak dan kewajiban.²⁶

Ulama *muta'akhirin* mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), h. 4.

²⁶ *Ibid.*

(suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban.²⁷

Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama adalah persetubuhan sedangkan arti kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainnya mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad kiasannya adalah persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, berdasar Surat An-Nisa Ayat 3, yaitu sebagai berikut,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah membolehkan menikahi hingga empat wanita jika seorang laki-laki mampu berlaku adil. Tetapi, jika laki-laki tersebut tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik menikahi satu orang saja, untuk menghindari perbuatan aniaya.

Nikah jika diartikan akad sebagaimana dikatakan di dalam mazhab Syafi'i akan menimbulkan hukum, yaitu tidak diakuinya kehamilan di luar nikah dan hasilnya. Anak yang lahir tidak ada hubungan sohr dengan orang tua biologisnya. Hukum halal ada pada perkawinan antara anak haram dengan ibu

²⁷ Ibid.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015),

kandungya. Al-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsut mengkritik para *fuqoha* yang hanya mementingkan segi formal dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama dan orang yang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa.

Allah menyebutnya dengan *Mitsaqon Gholidon*. Walaupun bagaimana bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama Syafi'iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan, karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah akad yang dapat menghalalkan kumpulnya seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang saling mencintai untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan syari'at Allah S.W.T.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum dari perkawinan dalam Islam adalah Al Quran dan Sunnah.

a. Al-Quran

Ada beberapa surat dalam Al Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan, yaitu sebagai berikut :

1) An-Nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*²⁹

Berdasarkan ayat di atas, artinya Allah menciptakan manusia untuk berpasangan agar bisa menghasilkan dan melanjutkan keturunan. Allah juga memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri, serta selalu bertakwa kepada Allah.

2) An-Nuur Ayat 31

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)., h.21

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.³⁰

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, artinya, Allah memerintah wanita untuk menutup aurat dan menjaga pandangannya, kecuali pada muhrimnya. Allah juga melarang wanita memukulkan kakinya agar

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h.34

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, serta memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa.

3) Ar-Ruum Ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah telah menciptakan wanita-wanita untuk dijadikan istri, agar laki-laki dapat merasa tentram. Perwujudan rasa kasih sayang dari suami istri, dapat dilakukan dengan cara menikah.

4) An-Nahl Ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka*

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015),

*mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah menciptakan wanita untuk dinikahi dan dijadikan istri, agar dapat memberikan keturunan dan rezeki yang baik, maka sebaiknya, manusia tidak mengingkari nikmat Allah.

b. Hadits

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni:

1) الْمَرْئُوتُكَحُّ بِدَاكَتَرِبَتَالِدِّيْنِدَا تَقَا طُفُولِدِيْنَهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا لِمَا رُبِعِلَاءُ هُ

"Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim).³³

Hadits di atas menjelaskan bahwa, ada empat alasan yang menjadi pertimbangan untuk menikahi wanita, yaitu, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Namun, yang paling penting adalah wanita yang taat beragama.

2) عَلَيْهِمْ تَقِيْمِيْنَ قَلِيْسُ سُنِّيَعَنْ رَغِيْبَمَنَا لِيْسَاءَ جُؤَا تَزَوُّوْا فِطْرُ
وَأَصُوْمُوْا نَا مُصَلِّيَا نَا لِكِتِّي

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h.72

³³ Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Kitab Shahih Bukhari, no. 827.

"Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (HR Bukhari dan Muslim).³⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa, menikah merupakan salah satu sunah yang disarankan oleh Nabi untuk dijalankan.

3) الْعَبْدُ تَزَوَّجًا دَا الْبَاقِيَ النَّصْفِ لِلْمَرْءِ قَالِ الدِّينِ نِصْفًا سَتَكُمَلَفَقَدِ

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya." (HR Baihaqi).³⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwa, menikah sama saja dengan menyempurnakan seperuh agama, karena merupakan wujud ketakwaan kepada Allah.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik dari segi subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum tersebut tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Demikian pula menurut ulama *Fiqh*, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hadits Riwayat Baihaqi, Kitab As-Sunnah Al-Kubra, no. 830

Dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab : *rakana, yarkunu, ruknan, warukunan* yang artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun adalah suatu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya perbuatan tersebut.³⁶

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan hukum tersebut juga dapat dibatalkan.

Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah :³⁷

a. Calon Suami, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon Istri, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam

³⁶ Neng Djubaedah., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 90

³⁷ Abd. Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 263

- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali Nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qobul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab Qobul, syarat-syaratnya :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qobul bersambungan yaitu tidak dipisah dengan kata-kata lain atau semisalnya
- 5) Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umroh

- 6) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Sedangkan maskawin (mahar) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah.³⁸

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Prof. Mahmud Junus dalam Erwinsyahbana, tujuan perkawinan ialah karena perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia
- b. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Memperoleh keturunan yang sah

³⁸ *Ibid.*, h.285

³⁹ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, April 2017

- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang)
- f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqon gholidon sekaligus mentaati perintah Allah Swt yang bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.

5. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:⁴⁰

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah atau seibu.
- d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

⁴⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.120.

- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, sebagian dari hal-hal yang diperintahkan untuk memelihara berkaitan dengan perempuan adalah agar ia tidak berasal dari kerabat dekat. Syahwat bangkit dengan kuatnya perasaan dengan melihat dan memegang. Syahwat menjadi kuat dengan hal aneh yang baru. Adapun orang yang telah dikenal melemahkan perasaan dan tidak membangkitkan syahwat.⁴¹ Adapun larangan perkawinan yang bersifat *ghoiru muabbad* adalah :

- a. Mengawini dua orang dalam satu masa. Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.
- b. Poligami diluar batas. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu.
- c. Larangan karena ikatan perkawinan. Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun, bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus

⁴¹ *Ibid.*, h.124

terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suami masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

- d. Larangan karena talak tiga. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnya.
- e. Larangan karena beda agama. Menurut Ibnu Rusyd, ulama' bersepakat bahwa seorang muslim dilarang mengawini *watsaniyyah* (penyembah berhala) dan boleh mengawini *kitabiyah*.
- f. Larangan karena Ihram. Ihram merupakan salah satu penghalang perkawinan. Oleh karena itu orang yang sedang menjalankan ihram haji dilarang menjalankan perkawinan. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.
- g. Larangan karena Zina. Perbuatan zina merupakan faktor yang dapat menjadi penghalang perkawinan. Maka, masalah halangan karena zina itu tentu menjadi persoalan juga bagi para pemeluk Islam. Sebab Al-Qur'an ayat ke 3 dari surat An-Nur Ayat 24 menyebutkan larangan itu, meskipun diantara fuqaha memperselisihkan sifat larangan itu karena dianggap ada unsur zanniy dalam ayat tersebut. Bukti bahwa ummat Islam menjadikan perbuatan zina menjadi penghalang perkawinan adalah pasal 53 ayat (1)

KHI Indonesia yang menyatakan bahwa, “seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

B. Perkawinan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:⁴²

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.
- b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.

⁴² Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafaah dalam Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 1 No. 2, 2012

- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus : ⁴³

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya.

Menurut Mr. Wirjono Prodjojoedikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum. ⁴⁴

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dibatalkan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan:

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan pasal 27 ayat 1 “Seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”. Lebih lanjut disebutkan dalam undang-undang republic Indonesia No 1 Tahun 1947 pasal 6 ayat (1) tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon”. Jadi perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua calon suami dan isteri seperti kawin di bawah umur yang didesak oleh masyarakat atas dasar hukum adat yang terjadi di desa Labuhan adalah batal dan menyalahi peraturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan.⁴⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak

⁴⁵ *Ibid.*

boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

3. Syarat Sah Perkawinan

Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum setahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum

⁴⁶Tengku Erwin Syahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 3 Nomor 1, 2017

tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan menentukan lain.

Pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun . Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14. Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.⁴⁸

5. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Larangan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat perkawinan berkenaan dengan pelanggaran sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum ISLAM DAN Hukum Adat*, Jurnal Hukum Unissula Semarang, Volume 7 Nomor 2, Desember 2016

- a. Calon mempelai belum cukup umur (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita)
- b. Terkena larangan melangsungkan perkawinan,
- c. Terikat tali perkawinan dengan orang lain
- d. Tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam hukum.

C. *Urf* (Tradisi)

1. Pengertian *Urf*

Urf yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut :⁵⁰

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b. Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat

⁵⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 167.

berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapaun *ijma'* menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

2. Macam-Macam Urf

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian: ⁵¹

Ditinjau dari segi sifatnya urf terbagi menjadi :

a. *Urf Qouli*

Urf Qouli ialah *urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, akan tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air.

b. *Urf Amaliy*

Urf Amaliy ialah *urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual

⁵¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 82

beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya urf terbagi atas :

a. *Urf Sahih*

Urf Sahih ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

b. *Urf Fasid*

Urf Fasid ialah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan *syara'*.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya urf terbagi menjadi :

a. *Urf Aam*

Urf Aam ialah *urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah atau tip kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

b. *Urf Khos*

Urf Khos ialah *urf* yang hanya berlaku pada suatu tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilaksanakan bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

3. Syarat-Syarat *Urf*

Syarat-syarat dalam menggunakan *urf* sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut :⁵²

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunah. Jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum *khamr*, riba, berjudi, jual beli *gharar*, dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisish pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentanginya.

⁵² Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59

- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.

4. Objek Urf

Adat sebagai sebuah dalil syari'at merupakan salah satu bentuk pendapat yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang memang tidak ada ruang bagi akal di dalamnya, seperti masalah ibadah, *qishos* istiadat dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan hudud. Setiap yang dapat dimasuki logika maka boleh menggunakan adat.⁵³

Mengenai mitos perkawinan yang dapat menyebabkan terjadinya musibah pada suatu daerah, hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam. Karena di dalam Islam, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Allah telah berfirman dalam Surat Ar-Rad ayat 11, yaitu:

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ بِإِبْنِ اللَّهِ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

⁵³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 168.

*Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*⁵⁴

Berdasarkan ayat di atas, artinya segala sesuatu yang terjadi baik di langit maupun bumi adalah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki terjadinya suatu keburukan maupun kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak dan merubah ketetapan Allah.



⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011)

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet Ke-7, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

P.Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta:Pustaka Mandiri, 2006)

Palwati Tahir, *Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.44

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta:Kencana, 2007)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015)

Sukarjo Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Angkasa 2003), h.142.

Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:Paradigma,2015)

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, (Jakarta:Pustaka Belajar, 2019), h.55.

Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS,2006)

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010)

Amirullah Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ke 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta

Panudju Bambang, 2009, *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Alumni, Bandung,

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid II/ Edisi Ketiga, Gunung Agung, Jakarta

Mr. J. B. J.M Ten Berge disuting oleh Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan I, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993

Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012)

Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT Almaa'rif, 2001)

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Idonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005)

Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sukarame dalam Angka 2017*, (Bandar Lampung: BPS Kota Bandar Lampung, 2017)

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tetang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost, Pasal 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tetang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos,Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos, Pasal 10

JURNAL

Dadi Rosadi dan Febi Oktarista Andriawan, Jurnal Computech & Bisnis. Edisi 10, No. 1,(Juni, 2016). h. 50

Iryani Eva, *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17No. 2, 2017.

Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”, Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya (On-line) tersedia di <https://dimensiilmu.blogspot.hukum-islam-dan-ruang-lingkupnya.html> diakses pada tanggal 9 Juni 2020.

Farhan, “Prinsip-Prinsip Hukum Islam”, (On-line), tersedia di <https://prinsip-prinsip-hukum-islam.com> (6 September 2020)

ON-LINE

¹“ *Definisi kos*” (On;line), tersedia di : <https://id.scribd.com/doc/288003775/Definisi-Kos> diakses tanggal 10 desember 2019 pukul 12.00 WIB

“*Fungsi kost pengertian mahasiswa pendapatan*” (On-line), <http://text-id.123dok.com/dokument/7q025j0xy-fungsi-kost-pengertian-mahasiswa-pendapatan.html> diakses pada tanggal 18 November 2020 12.00 WIB

“*Merancang kos-kosan standar sampai eksklusif*” (On-line), tersedia di : <https://economy.okezone.com/read/2014/03/27/479/961824/merancang-kos-kosan-standar-sampai-eksklusif> diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 12.00 WIB

“*Perbedaan Rumah Kontrakan dan Kos*” (On-line), tersedia di : <http://www.ilmusipil.com> diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 12.00 WIB

“*Yhuel, Hukum Islam*”, (On-line), tersedia di <http://www.kuliahhukum.com/hukum-islam/> diakses pada tanggal (5 September 2020)

“*Sejarah kos-kosan*” (On-line), tersedia di :<https://www.kostindekost.com/tag/sejarah-kos-kosan/> diakses tanggal 24 November 2020 pukul 12.20 WIB